

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM DALAM  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
(Studi Kasus Penetapan Nomor. 166 dan 167/Pdt.P/2010/PA. Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**PUTRI UTAMI  
NPM . 0771010132**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM DALAM  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
(Studi Kasus Penetapan Nomor. 166 dan 167/Pdt.P/2010/PA. Sby)

Disusun oleh :

**PUTRI UTAMI**  
**NPM. 0771010132**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 3 Desember 2010  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan

### **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

- |    |  |                  |                |
|----|--|------------------|----------------|
| 1  | <b><u>H. Sutrisno, SH, M.Hum</u></b><br><b>NIP. 19601212 198803 1 001</b>        | <b>(KETUA)</b>   | <b>1</b> ..... |
| 2. | <b><u>Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM</u></b><br><b>NIP. 19620625 199103 1 001</b> | <b>(ANGOTA)</b>  | <b>2</b> ..... |
| 3. | <b><u>Subani, SH, M.Si</u></b><br><b>NIP. 19510504 198303 1 001</b>              | <b>(ANGGOTA)</b> | <b>3</b> ..... |

**Mengetahui**  
**DEKAN**

**Hariyo Sulistiyantoro. SH.MM**  
**NIP.19620625 199103 1 001**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Studi Kasus Penetapan Nomor. 166 dan 167/Pdt.P/2010/PA. Sby”**, dapat terselesaikan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum, selaku pembimbing utama dalam skripsi ini dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim yang setia dalam membimbing dan mengarahkan hingga selesainya proposal skripsi ini
3. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Panggung Handoko, S.Sos, SH, MM, selaku Dosen pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penyusun sampai selesainya proposal ini.
5. Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn., selaku dosen yang telah memberikan banyak inspirasi yang tak terhingga bagi penulis, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji yang telah memberikan evaluasi, kritikan dan masukan yang berarti bagi penyusun.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Cholidul Azhar , S.H, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya
9. Bapak Syarif Hidayat. SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surabaya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Riyamin dan Ibu Sulami yang menjadi penyemangat terbesarku, yang selalu memberi doa, dukungan dan selalu menguatkan dalam setiap langkah kehidupan.
11. Kakak-kakakku tercinta Mochammad Ridwan, SH dan Mike Indarti yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
12. Buat seseorang yang spesial di dalam hatiku (Danu Suryo Nugroho, SE) terima kasih atas doa, dukungan dan semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan tulus sehingga memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabatku tercinta, Mas Wawan, Nanda, Mbak Ita, Tian, Ario, Yazid, Ajeng, Agita, Stella, Febrina, Hengky, serta seluruh Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penulisan skripsi ini.

14. Kepada senior dan saudara-saudaraku di Komando Resimen Mahasiswa Batalyon 806 Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur khususnya Komanadan Satriando Fajar Perdana, Wadan Sari Dwi Jayanti, serta semua staf dan anggota SATMENWA 806, terima kasih atas doa, dukungan, nasehat, dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa suatu nilai kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dengan penuh keikhlasan penulis akan merasa sangat berbahagia apabila terdapat kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi momentum awal yang bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia.

Surabaya, Desember 2010

Penulis

**Putri Utami**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	5
2. Dispensasi Pengadilan Agama terhadap Perkawinan dibawah umur.....	6
3. Tujuan Perkawinan.....	7
4. Hukumnya Melaksanakan Perkawinan .....	7

5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	9
6. Asas-Asas Hukum Perkawinan .....	11
7. Batasan Usia Perkawinan menurut Al-Qur'an dan UU Perkawinan.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Masalah.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data .....	17
4. Metode Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	18

<b>BAB II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA .....</b>	<b>20</b>
A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	20
B. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	23
C. Faktor- faktor Penyebab diajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	26
1. Faktor Pendidikan .....	26
2. Faktor Pemahaman Agama .....	27
3. Faktor Hamil Sebelum Menikah .....	27

<b>BAB III. ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN HAKIM</b>	
<b>DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI</b>	
<b>KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA .....</b>	<b>29</b>
A. Penetapan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan	
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	29
1. Penetapan Nomor. 166/Pdt.P/2010/PA. Sby.....	29
2. Penetapan Nomor. 167/Pdt.P/2010/PA.Sby.....	38
3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan	
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	46
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin	
di Pengadilan Agama Surabaya .....	51
C. Analisis Penetapan Hakim dalam Dispensasi Kawin	
di Pengadilan Agama Surabaya .....	54
 <b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	 <b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	20
Gambar 2	: Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya .....	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Permohonan No: 166/Pdt.P/2010/PA.Sby
- Lampiran 2 : Surat Permohonan No: 167/Pdt.P/2010/PA.Sby
- Lampiran 3 : Penetapan Nomor: 166/Pdt.P/2010/PA.Sby
- Lampiran 4 : Penetapan Nomor: 167/Pdt.P/2010/PA.Sby
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Putri Utami  
NPM : 0771010132  
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 09 Juli 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM DALAM  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
(Studi Kasus Penetapan Nomor. 166 dan 167/Pdt.P/2010/PA. Sby)**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. dan menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, memberikan gambaran pada instansi yang bergerak di bidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

***Kata Kunci : Penetapan Hakim, Perkara, Permohonan, Dispensasi, Kawin.***

Dalam mengimbangi kemajuan jaman yang semakin kompleks, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan, dengan harapan nantinya dapat meningkatkan efisiensi kerja perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri tetapi juga perusahaan-perusahaan luar negeri. Untuk memenangkan persaingan tersebut suatu perusahaan dituntut untuk bekerja sama secara efektif dan efisien. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahannya adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan modal dan sumber daya yang dimiliki, sedangkan keuntungan hanya dapat diraih apabila aktivitas perusahaan dapat berjalan secara efisien. Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini adalah untuk pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). Variabel yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah kompensasi ( $X_1$ ), motivasi ( $X_2$ ) dan kinerja karyawan ( $Y$ ). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert, dengan jumlah sampel 120 orang. Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian yang menganalisis pengaruh kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Surabaya, diperoleh hasil bahwa variabel kompensasi dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Surabaya. **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan perlu direncanakan secara matang sebelum perkawinan itu di langungkan. Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan.

Menurut Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama.<sup>1</sup>

Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 9

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam UU Perkawinan.<sup>2</sup>

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Timbullah anak zina, lalu orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih dibawah batas umur

---

<sup>2</sup> CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet. VIII, 1989, h. 230

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 231

ketentuan undang-undang, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding perut anak dara kelihatan sudah besar, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1 Faktor apa yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya?
- 2 Bagaimana pertimbangan dan penetapan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.
- 2 Untuk menganalisis pertimbangan dan penetapan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam dispensasi kawin.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Dan jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.<sup>4</sup>

UU Perkawinan telah menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16

---

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. VI, 1998, h. 32



(enam belas) tahun bagi wanita yaitu meliputi pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, namun undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Adapun yang penulis maksudkan dengan dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun

## **2. Dispensasi Pengadilan Agama terhadap Perkawinan Dibawah Umur**

Kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama )yaitu meliputi: Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk salah satu jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Permohonan diajukan dengan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), dalam pasal 3 merumuskan tujuan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

Soemiyati berpendapat bahwa Tujuan perkawinan dalam islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>5</sup>

#### **4. Hukumnya Melaksanakan Perkawinan**

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “mubah”. Dengan berdasarkan pada perubahan “Illahnya” atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi Sunnah, Wajib, Makruh, dan Haram.

Adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

##### ***Perkawinan sunnah***

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala sedang kalau tidak kawin tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.

##### ***Perkawinan wajib***

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Op. cit*, h. 12

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin dia akan berdosa.

#### ***Perkawinan makruh***

Perkawinan hukumnya menjadi Makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah baginya untuk kawin. Kalau ia kawin ia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin ia akan mendapat pahala.

#### ***Perkawinan haram***

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahannya yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena

penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya: rumah tangga tidak tentram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain-lainnya lagi, maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.<sup>6</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan ***rukun*** dari perkawinan ialah ***hakekat*** dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ***syarat*** adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Op. cit.*, h. 21

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h.61

- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* yang akan dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Subekti berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat syahnya perkawinan ialah: 1).Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun; 2).Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak; 3).Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama; 4).Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak; 5).Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.<sup>8</sup>

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

## 6. Asas-asas Hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata berlaku beberapa asas, antara lain yaitu:

1. Asas kesukarelaan, asas ini merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua, kedua belah pihak, kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, h. 23

sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama diatas. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan ini dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, asas ini juga disebutkan dalam Sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, dilarang oleh nabi Muhammad.
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Alquran surat Al-Nisa' (4)

Ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang

laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, dan kalau istri sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri..<sup>9</sup>

## 7. Batasan Usia Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan UU Perkawinan.

### a) Batas Usia Perkawinan Menurut Al-Qur'an.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

*"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya..."*<sup>10</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).<sup>11</sup>

### b) Batas Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Walaupun menurut Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, h. 139

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, h. 67

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, h. 68



“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur. tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

UU Perkawinan memang telah menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan, tapi tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah. Menurut KHI secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 53 KHI yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis.<sup>12</sup>

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus Perkawinan, yang diatur sesuai dengan UU Perkawinan yang meliputi Dispensasi Kawin dan di Pengadilan Agama Surabaya. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum deskriptif kualitatif.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> M. Syamsuddin , *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 57

- a). Data primer yaitu dapat berupa subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi, seperti hakim, jaksa dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori diatas data primer yang penulis gunakan dari hasil wawancara secara langsung dengan petugas dan referensi, dalam hal ini dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Surabaya, khususnya tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin.

- b) Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan dan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- Undang-Undang,
- Peraturan Pemerintah,
- Peraturan Menteri dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

---

<sup>13</sup> Indrati Rini, *Handout Metodologi Penelitian Hukum*, FH UPN, 2007, h. 17.

<sup>14</sup> M. Syamsuddin , *Op. cit*, h. 96

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya Putusan Hakim, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan sebagainya<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari Penetapan Hakim, literatu-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, indeks, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>16</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara.

---

<sup>15</sup> M. Syamsuddin, *Loc. cit*, h. 96

<sup>16</sup> Indrati Rini, *Loc. cit*, h. 17.

Adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis akan menganalisa Penetapan Hakim yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya, dan mengumpulkan literatu-literatur buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap.<sup>18</sup>

Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera muda hukum Pengadilan Agama Surabaya untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang digunakan adalah “metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data secara deskriptif dengan menguraikan masalah yang timbul, kemudian mengemukakan pandangan peneliti mengenai

---

<sup>17</sup> M. Syamsuddin , *Op. cit*, h. 101

<sup>18</sup> M. Syamsuddin , *Op. cit*, h. 108

pemecahan masalah tersebut dari data-data yuridis yang telah didapat sebelumnya”.<sup>19</sup>

Adapun dalam prakteknya nanti penulis akan mengidentifikasi masalah yang terdapat di masyarakat, untuk selanjutnya akan dijadikan topik penulisan, kemudian diklarifikasi sesuai dengan norma yang mengaturnya. Setelah itu dilakukan sistematisasi masalah agar dapat mudah untuk dicari jalan keluarnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi nanti dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi nanti. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II akan membahas mengenai Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Prosedur Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Indrati Rini, *Op. cit*, h. 41

Surabaya. Pada sub bab kedua mengangkat tentang Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan, sub bab ketiga mengangkat tentang Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya

Bab III lebih jauh akan membahas mengenai Analisis Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membahas tentang Penetapan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Pada sub bab kedua mengangkat tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan, sub bab ketiga mengangkat tentang Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya

BAB IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.